



Pemerintah Kota Denpasar
Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP 2025



[\(0361\) 234648](tel:(0361)234648)



www.kesbangpol.denpasarkota.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh staf di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

Denpasar, 02 Februari 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Denpasar,



A.A. Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.

Pembina Tk. I / IVb

NIP. 19720313 199603 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Isu Strategis.....	3
1.4 Struktur Organisasi	4
1.5 Sumber Daya Manusia	8
1.6 Sarana dan Prasarana Kantor	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Rencana Strategis.....	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 Indikator Kinerja Utama.....	21
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja	24
3.3 Pengukuran Kinerja	25
3.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	25
BAB IV PENUTUP	48
LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA (PK)	
LAMPIRAN 2 PENGUKURAN KINERJA	
LAMPIRAN 3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	
LAMPIRAN 4 RENCANA AKSI BADAN KESBANGPOL	
LAMPIRAN 5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan salah satu unsur dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan capaian–capaian kinerja dalam menjalankan visi dan misi organisasi. Di dalamnya memuat penilaian terhadap unsur perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi serta pencapaian kinerja.

Adapun mekanisme penyusunan laporan kinerja meliputi analisa terhadap sinergitas antara pencapaian kinerja dengan kebijakan dalam mewujudkan tujuan serta sasaran strategis OPD yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam penyusunan tersebut, dilakukan evaluasi juga terhadap perkembangan capaian tujuan dan sasaran dengan menggunakan informasi atau data – data yang diperoleh secara lengkap. Tahun 2025 merupakan tahun peralihan nomenklatur baru pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sekaligus tahun kelima dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* terkait atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar pada Tahun 2025. Indikator Kinerja Utama merupakan *outcome* dari program–program utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan sebagai dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik;
3. Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif;
4. Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
5. Persentase penurunan konflik sosial



Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan beberapa program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2024 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar memiliki tugas dan fungsi membantu Walikota Denpasar dalam menyelenggarakan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2021–2026.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar



- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12 tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
 10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 53);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja



- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026;
 13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar yang aman, nyaman, dan berdaya saing. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Kota Denpasar merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primordial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar yaitu mengantisipasi berbagai kerawanan sosial, politik yang berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta memiliki visi sebagai fasilitator dalam mewujudkan masyarakat Kota Denpasar yang aman, nyaman dan tenteram dalam menunjang pembangunan kota yang berwawasan budaya.

Upaya kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: Aspek wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang harus senantiasa menjiwai pola pandang sikap, penghayatan dan perilaku seluruh warga Negara Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek Politik, yaitu substansi kebijakan politik dalam negeri diarahkan untuk memperkokoh keberadaan NKRI, dengan mengembangkan sistem praktik nasional yang demokratis, berkedaulatan rakyat, terbuka serta diarahkan guna membangun bangsa dan watak bangsa menuju bangsa Indonesia yang maju bersatu, demokratis, adil dan makmur. Kota Denpasar merupakan kota yang terbuka, sehingga banyaknya penduduk mendatang dan mobilitas penduduk dapat menimbulkan berbagai



permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban di perkotaan sebagian besar diakibatkan oleh adanya ketidakdisiplinan warga kota terhadap tatanan kehidupan seperti administrasi kependudukan, pelanggaran lalu lintas, pelanggaran terhadap tata ruang, pelanggaran dalam bidang bangunan, tempat usaha maupun yang lainnya sehingga menimbulkan kesemrautan kota. Adapun isu strategis di bidang pelayanan keamanan dan ketertiban kota antara lain :

1. Belum optimalnya rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga untuk dapat beraktivitas;
2. Belum optimalnya jaminan rasa aman dengan memperluas partisipasi semua pihak untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban umum;
3. Belum optimalnya koordinasi dengan aparat keamanan, Desa Pekraman, Pecalang, dan semua stakeholder yang terkait dalam mengatasi kemungkinan timbulnya gangguan keamanan di lingkungan masing-masing.
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemilu guna mengurangi angka golput melalui pendidikan politik.

Untuk maksud tersebut diperlukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yang dapat dijabarkan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Analisis SWOT

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
<p>a) Badan Kesbangpol memiliki struktur organisasi yang jelas dan terkoordinasi dengan baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, yang mempermudah pelaksanaan tugas ;</p> <p>b) Badan Kesbangpol memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang kesatuan bangsa, politik, dan kerukunan sosial, yang memberikan dasar yang kuat dalam mengelola masalah kebangsaan ;</p> <p>c) Memiliki hubungan yang baik dengan instansi pemerintah,</p>	<p>a) Seringkali menghadapi kendala anggaran yang terbatas, sehingga program dan kegiatan tidak dapat dijalankan secara optimal. ;</p> <p>b) Meski memiliki tenaga ahli, jumlah SDM yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan tugas ;</p> <p>c) Program dan kegiatan Bakesbangpol seringkali kurang dikenal oleh masyarakat luas, sehingga partisipasi publik rendah;</p> <p>d) Dalam beberapa kasus, Badan Kesbangpol mungkin menghadapi kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan lembaga lain, seperti</p>



Kekuatan (<i>Strenghts</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
<p>lembaga masyarakat, dan tokoh-tokoh politik untuk koordinasi dan kolaborasi;</p> <p>d) Didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi;</p> <p>e) Berperan sebagai mediator dalam konflik sosial dan politik, sehingga dapat mencegah eskalasi masalah.</p>	<p>kementerian lain atau aparat keamanan, yang dapat memperlambat respons terhadap masalah kebangsaan.</p>
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman /tantangan (<i>Threats</i>)
<p>a) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesatuan bangsa dan stabilitas politik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi publik ;</p> <p>b) Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, Badan Kesbangpol dapat memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan sosialisasi, monitoring, serta komunikasi dengan masyarakat dan lembaga lain dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi ;</p> <p>c) Bekerja sama dengan LSM dan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan program.</p>	<p>a) Tingginya polarisasi politik di masyarakat dapat menghambat upaya menjaga kesatuan bangsa ;</p> <p>b) Munculnya isu-isu sensitif terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dapat memicu konflik sosial ;</p> <p>c) Maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial yang dapat memecah belah persatuan bangsa;</p> <p>d) Ancaman radikalisme dan terorisme dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional;</p> <p>e) Dinamika politik yang cepat dan perubahan kebijakan yang tidak terduga dapat mengganggu pelaksanaan tugas Badan Kesbangpol, terutama dalam menghadapi isu-isu kebangsaan yang selalu berkembang.</p>

1.4 Struktur Organisasi

BadaBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Denpasar. Pelaksanaan tugas sehari–hari, dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris yang membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Kelompok Jabatan Fungsional dan 4 (empat) Bidang



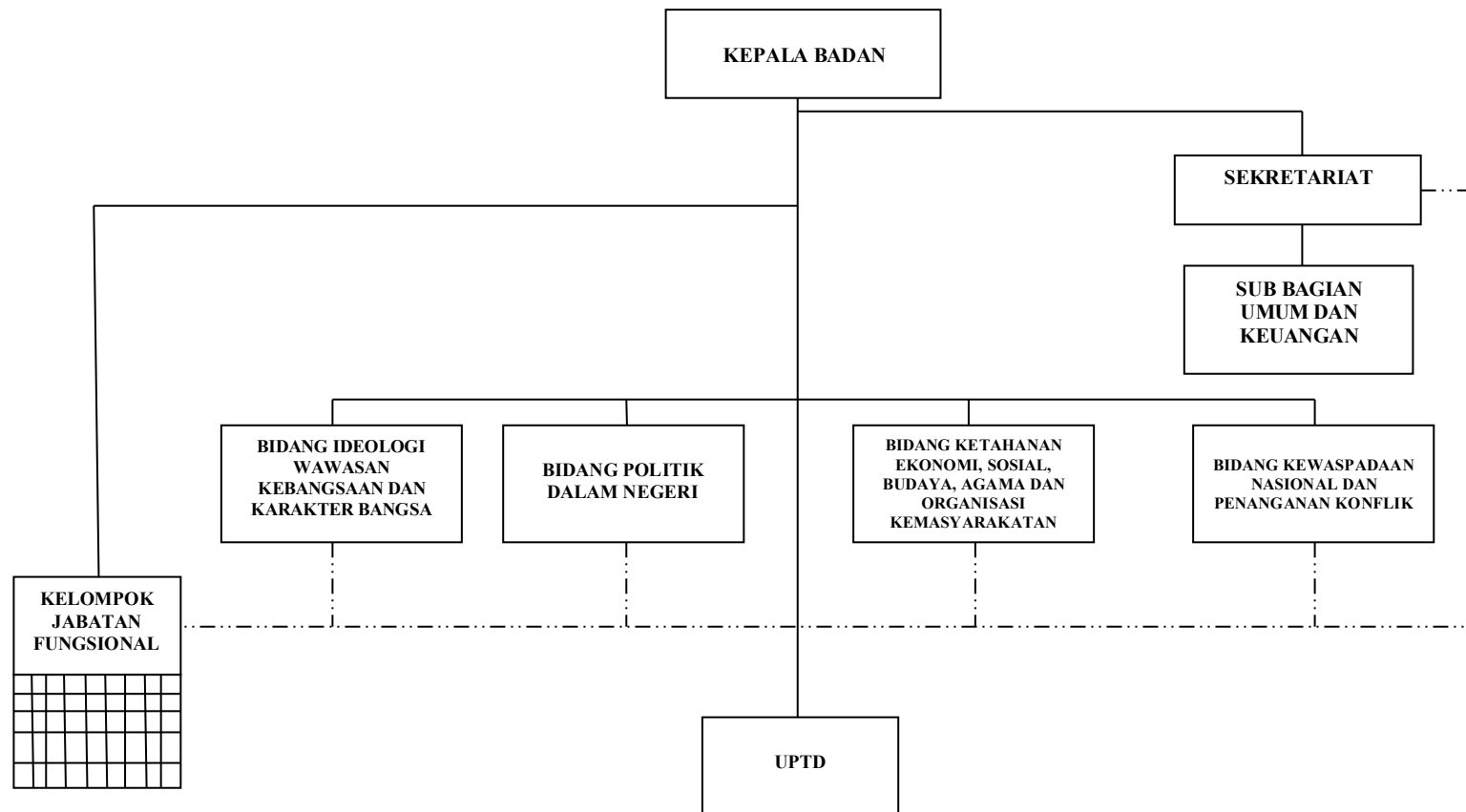
yang membawahi 8 (delapan) Kelompok Jabatan Fungsional dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris;
3. Sekretariat terdiri atas :
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama dan Organisasi Masyarakat;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
7. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Kedudukan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
2. Tugas Pokok
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, mempunyai tugas membantu Walikota dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Kota;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Kota;
 - c. Penyelenggaraan administrasi badan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan dan;
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar



Sumber: Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah



1.5 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar pada tahun 2025 sebanyak 59 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 21 orang, PPPK Penuh Waktu sebanyak 33 dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 5 orang. Adapun latar belakang pendidikan dan golongan dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 1.2
Jumlah dan Komposisi
PNS dan PPPK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025

No	SUB UNIT	JUMLAH
1	Sekretariat	26 Orang
2	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	10 Orang
3	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	9 Orang
4	Bidang Politik Dalam Negeri	6 Orang
5	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	8 Orang
	Total	59 Orang

Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

1. Kepala Badan : 1 Orang
2. Sekretaris : 1 Orang
3. Kepala Bidang : 4 Orang
4. Jabatan Fungsional Ahli Muda : 3 Orang
5. Jabatan Fungsional Ahli Pertama: 4 Orang
6. Kepala Sub Bagian : 1 Orang
7. Pelaksana : 45 Orang

Data ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 1.3
Jumlah dan Komposisi ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	Total
6 Orang	34 Orang	-	19 Orang	-	59 Orang

Tabel 1.4
Rekapitulasi PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025 Menurut Golongan/Ruang

Golongan	IV c	IV b	IV a	III d	III c	III b	III a	II d	II c	II b	II a	Total
Jumlah (Orang)	-	1	3	8	1	5	1	-	2	-	-	21

Tabel 1.5
Rekapitulasi PPPK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025 Menurut Golongan/Ruang

Golongan	XVI	XIV	XIII	XII	XI	X	IX	VII	VI	V	Total
Jumlah (Orang)	-	-	-	-	-	-	23	-	-	15	38

Adapun PPPK pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar pada Tahun 2025 sebanyak 38 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Arsiparis Ahli Pertama : 1 Orang
2. Perencana Ahli Pertama : 1 Orang
3. Penata Layanan Operasional : 19 Orang
4. Pengadministrasi Perkantoran : 12 Orang
5. Operator Layanan Operasional : 5 Orang

1.6 Sarana dan Prasarana Kantor

Pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar adalah sebagai berikut :



Tabel 1.5
Daftar Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
Tahun 2025

No	Jenis Barang	Jumlah
1	AC	22
2	Alat Dapur Lainnya	1
3	Alat Kantor Lainnya	2
4	Alat Komunikasi Lain-lain	5
5	Alat Musik	18
6	Alat Pendingin Lain-lain	2
7	Alat Rumah Tangga Lain	211
8	Aset Renovasi	4
9	Brand Kas	1
10	Buku Umum	1
11	Camera + Attachment	4
12	Camera Electronic	1
13	Camera Film	1
14	Dispenser	1
15	Facsimile	2
16	Filling Besi	12
17	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	2
18	Handy Cam	3
19	Handy Talky	4
20	Hub	1
21	Jam	0
22	Kendaraan Roda Dua	13
23	Kendaraan Roda Empat	6
24	Kipas Angin	1
25	Kotak Bahasa untuk Kalimat Huruf Cetak	1
26	Kursi Besi	25
27	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2
31	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	3



32	Kursi Lipat	20
33	Kursi Putar	4
34	Kursi Rapat	26
35	Kursi Ruang Rapat Staff	20
36	Kursi Tamu	1
37	Lambang Garuda	2
38	Laptop/Notebook	14
39	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2
40	Lemari Besi	1
41	Lemari Kayu	5
42	Lemari Penyimpanan	2
43	Meja ½ Biro	1
44	Meja Kerja Kayu	1
45	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
46	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6
47	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8
48	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	4
49	Meja Komputer	2
50	Meja Podium	1
51	Meja Rapat	23
52	Rice Warmer	1
53	Mesin Absen	2
54	Mesin Foto Copy	1
55	Mesin Hitung Manual	1
56	Mesin Proses Lain-lain	1
57	Mic Conference	1
58	P.C (Personal Computer)	26
59	Papan Nama Instansi	2
60	Papan Pengumuman	1
61	Papan Visuil	1
62	Peralatan Jaringan Lain-lain	7
63	Peralatan Personal Computer Lain-lain	3
64	Printer	22
65	Proyektor + Attachment	1
66	Rak Besi	1



67	Rak Kayu	5
68	Rak-rak Penyimpanan	4
69	Scanner	1
70	Slide Proyektor	1
71	Sound System	3
72	Sova	9
73	Switcher/Menara Antena Lain-lain	1
74	Telephone	2
75	Telephone Mobile	0
76	Televisi	1
77	Tiang Bendera	1
78	Monitor	1
79	Video Camera dan Recorder	0
80	White Board	2
81	Batang Bambu/Besi	1
82	Tanaman Perkebunan Lain-Lain	1
83	Bangunan Gedung Kantor	1
84	Mesin Proses Lainnya	1
85	Personal Komputer Lainnya	3
	Total	611

1.7 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar selama tahun 2025. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Pemerintah Kota Denpasar. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



IKTHISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, aspek strategis serta permasalahan utama, struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana kantor, serta sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dan Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja, analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
4. Rencana Aksi Tahun 2025
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Visi

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tidak lepas dari aturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021–2026, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005–2025 yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1).

Dalam RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005–2025, Visi yang diemban adalah **“DENPASAR KOTA BERBUDAYA DILANDASI TRI HITA KARANA”**. Kata “Kota Budaya” yang dimaksud adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah Tri Hita Karana yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

Sesuai dengan Visi Kota Denpasar Tahun 2021–2026 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021–2026 yaitu **“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU”**, yang dimaknai sebagai Denpasar Kota Hidup”. Kota Hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan



kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan.

Misi

Penjabaran lebih konkrit Visi pembangunan dimaksud Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021–2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan;
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalnya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana;
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*);
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana;
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Berdasarkan Visi Kota Denpasar di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Misi 2 (dua) yaitu “Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalnya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana”. Mengacu pada Visi Pembangunan dimaksud, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar menjabarkan secara lebih rinci ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tahun 2021–2026, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar. Diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan Kota Denpasar melalui program – program yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai kinerja/tujuan/sasaran seperti yang telah diuraikan pada Rencana Strategis Tahun 2021–2026 disusunlah suatu perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang harus dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun pelaksanaan anggaran. Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan OPD yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Perjanjian kinerja ini merupakan komitmen seluruh pegawai untuk mencapai



kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sepenuhnya dapat dirujuk pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Penetapan kinerja yang dibuat awal tahun 2025 telah ditetapkan dalam DPA Tahun 2025 antara dengan Kepala Badan dengan Sekretaris dan Kepala Bidang, dan antara Kepala Bidang dengan Jabatan Fungsional Teknis. Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	N/A	100%	100%	100%	100%
			Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	N/A	70%	75%	75%	80%
			Persentase Jumlah Ormas yang Terdaftar dan Aktif	N/A	67%	68%	69%	70%
			Persentase Pembinaan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	N/A	100%	100%	100%	100%
		Optimalnya Upaya Penanganan Kriminalitas	Persentase Penurunan Konflik Sosial	N/A	60%	70%	80%	90%



Berdasarkan Tabel 2.1.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, ditetapkan tujuan strategis yaitu meningkatkan pengendalian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sasaran dan indikator kinerja yang diukur secara berkelanjutan pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, digunakan beberapa indikator kinerja. Indikator persentase pemantapan pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan menunjukkan capaian yang sangat optimal, di mana sejak tahun 2022 hingga tahun 2025 target kinerja ditetapkan sebesar 100 persen dan dapat dipertahankan secara konsisten.

Indikator persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Target kinerja yang semula ditetapkan sebesar 70 persen pada tahun 2022, meningkat menjadi 75 persen pada tahun 2023 dan 2024, serta kembali meningkat menjadi 80 persen pada tahun 2025. Peningkatan target tersebut mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam memperkuat kualitas pendidikan politik dan budaya demokrasi di masyarakat.

Selanjutnya, indikator persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan aktif juga menunjukkan perkembangan positif. Target kinerja meningkat secara bertahap dari 67 persen pada tahun 2022, menjadi 68 persen pada tahun 2023, 69 persen pada tahun 2024, dan mencapai 70 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan efektivitas upaya pembinaan, pendataan, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pada indikator persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama, target kinerja ditetapkan sebesar 100 persen sejak tahun 2022 hingga tahun 2025. Konsistensi target ini menunjukkan bahwa pembinaan ketahanan masyarakat merupakan prioritas utama yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.



Selain sasaran tersebut, ditetapkan pula sasaran optimalnya upaya penanganan kriminalitas, yang diukur melalui indikator persentase penurunan konflik sosial. Target kinerja pada indikator ini menunjukkan peningkatan signifikan, yaitu dari 60 persen pada tahun 2022, meningkat menjadi 70 persen pada tahun 2023, 80 persen pada tahun 2024, dan mencapai 90 persen pada tahun 2025. Peningkatan target tersebut menggambarkan arah kebijakan yang semakin menitikberatkan pada penguatan pencegahan dan penanganan konflik sosial secara terpadu.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menggambarkan arah perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar yang berfokus pada penguatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan politik, serta penguatan ketahanan sosial secara berkelanjutan dalam kurun waktu 2021–2025.

2.1.2 Rencana Kerja

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2025 ini merupakan penjabaran tahun kelima daripada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Rencana program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar mengacu pada nomenklatur baru yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan diatas. Adapun program dan kegiatan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar untuk Tahun Anggaran 2025 ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.2
Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administasi Keuangan Perangkat Daerah	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum	a. Penyediaan Komponen Instalansi



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Perangkat Daerah	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			f. Fasilitas Kunjungan Tamu
			g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. Pengadaan Mebel
			b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			b. Pemeliharaan Mebel
			c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
2	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			c. Pembentukan Paskibraka



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	Peningkatan Peran Serta Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	a. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	a. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
6	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			d. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Rencana kerja merupakan dokumen yang merinci langkah-langkah konkret yang akan dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar untuk mencapai tujuan organisasi dalam satu periode tertentu. Turunan dari Rencana Kerja yang lebih spesifik dalam mengukur pencapaian target dengan indikator kinerja dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun ke depan sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
Rencana Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100
			Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%	80
			Persentase Jumlah Ormas yang	%	70



			Terdaftar dan Aktif		
			Persentase Pembinaan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	%	100
		Optimalnya Upaya Penanganan Kriminalitas	Persentase Penurunan Konflik Sosial	%	90

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja ditetapkan untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025 memuat informasi tentang target sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana atau target capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar. Disamping itu dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi tentang program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran dimaksud.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, transparan dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;



3. Sebagai dasar penilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perjanjian kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun Tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai Eselon II, Eselon III, Eselon IV, hingga level pelaksana. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Kota Denpasar untuk Tahun 2025, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
Penurunan Kasus Konflik Sosial di Kota Denpasar	Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial	7.69%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi adalah hasil atau pencapaian yang diperoleh suatu organisasi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan programnya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja adalah perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu, evaluasi terhadap kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama atau disebut dengan IKU dari beberapa indikator yang ada. Capaian IKU diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.



Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dan Target Kinerja Tahun 2025

Tugas Pokok : 1 Badan Kesbangpol Kota Denpasar mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik

Fungsi : 1 Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2 Pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang kesatuan bangsa dan politik.

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban	1 Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(Realisasi pelaksanaan kegiatan dibagi Target kegiatan) X 100%	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	100%
		2 Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik	(Realisasi partisipasi parpol dan lembaga pendidikan politik dibagi Target parpol dan lembaga pendidikan politik) X 100%	Bidang Politik Dalam Negeri	Bidang Politik Dalam Negeri	80%



NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
		3 Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	(Data Ormas tahun sebelumnya ditambah data Ormas tahun berjalan dibagi Jumlah Ormas yang terdaftar) X 100%	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	70%
		4 Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	(Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pemantauan dibagi Target laporan pembinaan dan pemantauan) X 100%	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	100%
2	Optimalnya upaya penanganan kriminalitas	5 Persentase penurunan konflik sosial	(Jumlah laporan kasus konflik sosial dibagi Target laporan kasus konflik sosial) X 100%	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	90%



Tabel 3.2
Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban	1	$x = \frac{4 \text{ Kegiatan}}{4 \text{ Kegiatan}} \times 100\%$	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	100%
		2	$x = \frac{\text{Realisasi 9 partisipasi parpol dan lembaga pendidikan politik}}{\text{Target 9 partisipasi parpol dan lembaga pendidikan politik}} \times 100\%$	Bidang Politik Dalam Negeri	Bidang Politik Dalam Negeri	80%



NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
		3 Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	$x = \frac{92 \text{ ormas}}{99 \text{ Ormas} + 33 \text{ Ormas}} \times 100\%$	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	70%
		4 Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	$x = \frac{1 \text{ Laporan}}{1 \text{ Laporan}} \times 100\%$	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	100%
2	Optimalnya upaya penanganan kriminalitas	5 Persentase penurunan konflik sosial	$x = \frac{12 \text{ Laporan Kasus Konflik Sosial}}{13 \text{ Laporan Kasus Konflik Sosial}} \times 100\%$	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	90%



3.1.1. Capaian Kinerja Tahun ini Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang secara rinci dari capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik	75%	75%	100%	80%	100%	125%
		Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	69%	69%	100%	70%	70%	100%
		Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Optimalnya Upaya Penanganan	Persentase penurunan konflik sosial	80%	80%	100%	90%	92.31%	102.56%



3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir memiliki tujuan yang komprehensif dalam upaya pengembangan dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar. Melalui perbandingan ini, organisasi dapat mengukur perkembangan kinerja secara berkesinambungan dengan melihat tren dan pola yang terjadi dari tahun ke tahun, sehingga dapat memantau efektivitas program yang telah dijalankan. Selain itu, perbandingan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian target dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai dijelaskan pada tabel 3.1.2. sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Tabel Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik	70%	70%	75%	80%	70%	70%	75%	100%
	Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	67%	68%	69%	70%	67%	68%	69%	70%



Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Optimalnya Upaya Penanganan	Persentase penurunan konflik sosial	60%	70%	80%	90%	N/A	-27%	80%	92.31%

Berdasarkan tabel 3.1.2 capaian kinerja, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran strategis berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh indikator kinerja pada sasaran ini berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, baik pada tahun 2022, 2023, 2024 maupun tahun 2025, dengan persentase capaian mencapai 100 persen.

Pada indikator pemantapan pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, target dan realisasi pada kedua tahun pelaporan tercapai sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan ideologi dan penguatan karakter kebangsaan telah dilaksanakan secara konsisten dan efektif sesuai dengan perencanaan.

Selanjutnya, indikator peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik juga menunjukkan capaian optimal. Meskipun terdapat peningkatan target dari tahun 2024 ke tahun 2025, realisasi kegiatan bahkan melampaui target tersebut sehingga persentase capaian berada pada angka 100 persen.

Pada indikator jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar dan aktif, kinerja pelaksanaan juga menunjukkan tren positif. Target yang ditetapkan pada masing-masing tahun dapat direalisasikan sepenuhnya, yang mencerminkan efektivitas upaya pembinaan, pendataan, dan pengawasan Ormas di daerah.



Selain itu, indikator pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama memperlihatkan capaian maksimal, dengan target dan realisasi yang sama pada kedua tahun pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan ketahanan masyarakat telah berjalan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Untuk sasaran berikutnya, yaitu optimalnya upaya penanganan konflik sosial, indikator persentase penurunan konflik sosial juga menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Target penurunan konflik yang ditetapkan pada tahun 2024 dan 2025 berhasil direalisasikan sepenuhnya, sehingga persentase capaian mencapai 100 persen.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menggambarkan bahwa kinerja perangkat daerah dalam mendukung stabilitas keamanan, ketertiban, serta ketahanan sosial masyarakat telah terlaksana secara efektif dan akuntabel, dengan capaian kinerja yang konsisten dan optimal pada periode pelaporan tahun 2024–2025.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian indikator kinerja dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Evaluasi ini penting untuk menilai efektivitas program dan kebijakan yang telah diterapkan, sehingga dapat diketahui apakah upaya yang dilakukan sudah sesuai dengan harapan. Selain itu, perbandingan ini membantu mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian strategi agar lebih optimal. Melalui proses ini, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan juga dapat meningkat, karena hasil evaluasi memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian yang telah diraih. Hasil analisis yang didapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih berkelanjutan dan tepat sasaran.



Tabel 3.1.3
Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Target Jangka Menengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100% (Sangat Tinggi)
		Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik	100%	80%	125% (Sangat Tinggi)
		Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	70%	70%	100% (Sangat Tinggi)
		Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100%	100%	100% (Sangat Tinggi)
2	Optimalnya Upaya Penanganan	Persentase penurunan konflik sosial	92.31%	95%	97.16 (Sangat Tinggi)

Berdasarkan tabel Realisasi Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Tahun 2026), dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 secara umum telah menunjukkan hasil yang sangat baik dan selaras dengan target yang telah ditetapkan.

Pada tujuan/sasaran berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban, seluruh indikator kinerja menunjukkan capaian yang optimal. Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan telah mencapai



100%, sesuai dengan target akhir tahun 2026 sebesar 100%, sehingga tingkat kemajuannya mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi.

Selanjutnya, persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik telah mencapai 100%, bahkan lebih tinggi dari target akhir tahun 2026 sebesar 80%, dengan tingkat kemajuan 125% dan kategori Sangat Tinggi.

Indikator persentase jumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terdaftar dan aktif juga menunjukkan capaian 70%, sama dengan target akhir tahun 2026, sehingga tingkat kemajuannya mencapai 100% dan berada pada kategori Sangat Tinggi.

Demikian pula, persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama telah mencapai 100%, sesuai dengan target akhir tahun 2026 sebesar 100%, dengan tingkat kemajuan 100% dan kategori Sangat Tinggi.

Sementara itu, pada tujuan/sasaran optimalnya upaya penanganan konflik sosial, indikator persentase penurunan konflik sosial pada tahun 2025 telah mencapai 92,31% dari target akhir tahun 2026 sebesar 95%. Dengan demikian, tingkat kemajuan yang dicapai sebesar 97,16%, yang juga dikategorikan Sangat Tinggi.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai atau mendekati target akhir tahun 2026, mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta konsistensi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

3.1.4 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Realisasi kinerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dibandingkan dengan standar provinsi dan nasional terlihat pada tabel 3.1.4 memberikan gambaran sejauh mana capaian yang telah diraih sesuai dengan target yang ditetapkan. Perbandingan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program, kebijakan serta sumber daya yang telah digunakan dalam mencapai hasil yang diharapkan. Jika realisasi kinerja lebih tinggi dari standar provinsi dan nasional, maka dapat diartikan bahwa strategi dan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika kinerja masih di bawah standar, maka perlu dilakukan analisis terhadap faktor penghambat dan perbaikan dalam aspek tertentu, seperti perencanaan, implementasi, maupun pengawasan. Dengan demikian, perbandingan ini menjadi alat penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan pembangunan secara berkelanjutan.

Tabel 3.1.4



Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Provinsi	Standar Nasional	%Capaian dengan Provinsi	%Capaian dengan Nasional
1	2	3	4	5	6	7=4/5*100	8=4/6*100
1	Optimalnya Upaya Penanganan	Persentase penurunan konflik sosial	92.31%	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Provinsi	Standar Nasional	%Capaian dengan Provinsi	%Capaian dengan Nasional
1	2	3	4	5	6	7=4/5*100	8=4/6*100
1	Terwujudnya Bali yang Aman, Tertib dan Demokratis	Indek Demokrasi Indonesia	-%	-%		100%	N/A

Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Provinsi	Standar Nasional	%Capaian dengan Provinsi	%Capaian dengan Nasional
1	2	3	4	5	6	7=4/5*100	8=4/6*100
1	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi,	Indeks Demokrasi Indonesia	N/A	-	N/A	-	N/A
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu	N/A	-	N/A	-	N/A
		Indeks Kinerja Ormas.	N/A	-	N/A	-	N/A



2	Simpul Strategis Pembumihian Pancasila Berjalan Optimal	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	N/A	-	N/A	-	N/A
		Indeks Capaian Revolusi Mental	N/A	-	N/A	-	N/A
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	N/A	-	N/A	-	N/A
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	N/A	-	N/A	-	N/A
3	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	N/A	-	N/A	-	N/A

Pada table 3.1.4 dapat dilihat kinerja utama masing-masing dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, dan Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Terdapat perbedaan dimasing-masing instansi terkait kinerja utama. Untuk penyelarasan Indikator Kinerja Utama kedepannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar akan melakukan koordinasi dengan Provinsi dan Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Sosulsi yang telah Dilakukan

Pada tabel 3.1.5 terlampir analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar selama periode Tahun 2024.



Tabel 3.1.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Persentase pematapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none">• Ketersediaan dana yang memadai untuk melaksanakan program secara efektif• Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dalam bidang politik, kesatuan bangsa, dan resolusi konflik• Dukungan infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program	Mempertahankan dan meningkatkan kinerja saat ini
		Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik	80%	100%	125%	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi yang efektif antar unit kerja di dalam Kesbangpol• Kolaborasi dengan instansi pemerintah lain, organisasi	Mempertahankan dan meningkatkan kinerja saat ini



						masyarakat, dan stakeholders terkait	
		Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	70%	70%	100%	<ul style="list-style-type: none">• Program dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan• Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai target Kemampuan untuk menyesuaikan program dengan perubahan kondisi dan kebutuhan yang muncul selama pelaksanaan	Mempertahankan dan meningkatkan kinerja saat ini
		Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program• Melakukan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman	Mempertahankan dan meningkatkan kinerja saat ini



						dan dukungan masyarakat terhadap program	
						<ul style="list-style-type: none">• Program harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat	
		Persentase penurunan konflik sosial	90%	92.31%	102.56%	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi yang efektif antar unit kerja di dalam Kesbangpol Kolaborasi dengan instansi pemerintah lain, organisasi masyarakat, dan stakeholders terkait	Mempertahankan dan meningkatkan kinerja saat ini

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa seluruh target kinerja dapat dicapai, hal ini terjadi dikarenakan :

- a. Perencanaan yang Matang dan Terarah;
- b. Sumber Daya yang Memadai;
- c. Koordinasi dan Kerjasama yang Baik;
- d. Implementasi yang Efektif;
- e. Partisipasi dan Dukungan Masyarakat.

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan perencanaan kegiatan dengan lebih baik lagi sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2026 dapat berjalan dengan lebih baik dan seluruh anggaran dapat direalisasikan;



- b. Komunikasi dan koordinasi antar pemegang puncak pimpinan perlu ditingkatkan sehingga gangguan dari kebijakan politik dapat ditekan sekecil-kecilnya;
- c. Perlu adanya penyeragaman pandangan terhadap regulasi yang digunakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di daerah;
- d. Diklat – diklat perlu diperbanyak sehingga SDM yang berkompetensi dapat diwujudkan.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub-bab ini, akan dilakukan analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya dengan fokus pada upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal. Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi faktor kunci dalam mencapai keberhasilan IKU.

Tabel 3.1.6
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisien si
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	5.423.246.200	5.174.422.046	95,41%	4,59%
		Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik	80%	100%	125%	1.932.343.000	1.890.191.880	97,82%	2,18%
		Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	70%	70%	100%	888.427.500	444.306.900	50,01%	49,99%



		Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100%	100%	100%	2.446.909.268	2.283.205.468	93.31%	6.69%
2	Optimalnya Upaya Penanganan	Persentase penurunan konflik sosial	90%	92.31%	102.56%	1.131.190.000	949.186.008	83.91%	16.09%

Secara umum realisasi pencapaian kinerja dan anggaran yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar pada tahun 2025 telah berjalan efektif dan efisien, hanya pada indikator Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif realisasi anggarannya tidak bisa mencapai 100% dikarenakan terdapat hibah kepada ormas yang tidak dapat direalisasikan. Untuk indikator kinerja tingkat efisiensi mencapai 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam mencapai target kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar telah efisien dalam memanfaatkan sumber anggaran. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sudah memiliki kualitas SDM yang cukup baik dalam rangka menganalisa tantangan, permasalahan yang dihadapi lembaga/organisasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sehingga efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja dan penyerapan anggaran dapat dicapai seoptimal mungkin.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian%	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian%	Menunjang atau tidak menunjang
1	Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%	Menunjang
				Kegiatan Perumusan	Persentase terlaksananya	100%	Menunjang



				Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	100%	Menunjang
		Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik	100%	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Peran	100%	Menunjang



		dalam pengembangan etika serta budaya politik		Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan	100%	Menunjang



				Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan	100%	Menunjang



				Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
		Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	70%	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase terlaksananya Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	Menunjang
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	Menunjang	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100%	Menunjang	



				<p>Program PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</p>	Persentase terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	100%	Menunjang
		Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100%	<p>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p>	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	Menunjang
				<p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100%	Menunjang
2	Optimalnya Upaya Penanganan	Persentase penurunan konflik sosial	92.31%	<p>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan</p>	Persentase Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan	100%	Menunjang



				Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan	100%	Menunjang



				Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Menunjang



Berdasarkan Tabel 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa mayoritas program, kegiatan, dan sub kegiatan telah memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis, yang tercermin dari capaian indikator program/kegiatan sebesar 100% dan status “menunjang”. Namun demikian, terdapat satu indikator sasaran yang belum mencapai target optimal, sehingga perlu dianalisis keterkaitan antara capaian output kegiatan dengan outcome yang diharapkan.

Pada Sasaran Strategis pertama, yaitu Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban, indikator Persentase pementapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan tercapai 100%. Capaian tersebut selaras dengan keberhasilan pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan beserta seluruh kegiatan turunannya, termasuk perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta pembentukan Paskibraka yang seluruhnya terealisasi 100%. Kondisi ini menunjukkan adanya konsistensi antara perencanaan dan implementasi, serta efektifnya pendekatan pembinaan berbasis partisipasi masyarakat. Dengan demikian, program dan kegiatan pada bidang ini secara substantif menunjang pencapaian sasaran kinerja karena output yang dihasilkan berkontribusi langsung terhadap penguatan wawasan kebangsaan dan stabilitas sosial.

Hal yang sama terlihat pada indikator Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik yang mencapai 100%. Seluruh komponen Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik terlaksana secara optimal. Kegiatan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, hingga monitoring dan evaluasi seluruhnya terealisasi 100% dan dinyatakan menunjang. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola pendidikan politik berjalan efektif dan berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi lokal, sehingga secara langsung mendukung stabilitas politik daerah.

pada indikator Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif, target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan memang sebesar 70%, dan realisasinya telah mencapai 70% atau dengan kata lain tercapai 100% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian, secara metodologis indikator tersebut tidak dapat dikategorikan belum optimal, melainkan telah memenuhi target kinerja sebagaimana direncanakan.



Capaian tersebut menunjukkan bahwa Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan beserta kegiatan turunannya—termasuk perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pengawasan Ormas—telah berjalan efektif dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator sasaran. Status “menunjang” pada seluruh rangkaian kegiatan tersebut konsisten dengan keberhasilan pencapaian target 70% Ormas terdaftar dan aktif.

Penetapan target sebesar 70% sendiri dapat dipahami sebagai pendekatan realistis berbasis kondisi eksisting (baseline), mengingat dinamika organisasi kemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kepatuhan administratif, keberlanjutan kepengurusan, serta partisipasi aktif anggota. Oleh karena itu, capaian 70% yang sesuai target menunjukkan bahwa strategi pembinaan dan pengawasan telah mampu menjaga tingkat keaktifan Ormas dalam batas yang direncanakan secara rasional dan terukur..

Selanjutnya, pada indikator Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama yang mencapai 100%, seluruh Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga terealisasi 100% dan dinyatakan menunjang. Kegiatan perumusan kebijakan teknis serta monitoring dan evaluasi berjalan sesuai target. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara output (jumlah laporan dan kegiatan fasilitasi) dengan outcome berupa terjaganya ketahanan sosial masyarakat.

Pada Sasaran Strategis kedua, yaitu Optimalnya Upaya Penanganan, indikator Persentase penurunan konflik sosial tercapai sebesar 92,31%. Meskipun belum mencapai 100%, capaian tersebut tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik. Seluruh Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, termasuk kegiatan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, terealisasi 100% dan dinyatakan menunjang. Hal ini mengindikasikan bahwa secara struktural dan administratif, sistem kewaspadaan dini dan penanganan konflik telah berjalan efektif. Adapun selisih capaian kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung perangkat daerah, seperti dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.



Maka dapat ditegaskan bahwa pada indikator ini tidak terdapat kegagalan pencapaian kinerja. Seluruh program dan kegiatan pendukung terbukti memiliki hubungan kausal yang memadai terhadap outcome yang ditetapkan, sehingga secara keseluruhan indikator Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif merupakan bagian dari kinerja yang berhasil dan menunjang pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

3.3.3. Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.30
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 9,354,050.00	Rp. 9,183,050.00	94.34 %	
	Administasi Keuangan Perangkat Daerah	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4,833,780,600.00	Rp 4,084,782,680.00	84.50	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		a. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 6,232,000.00	Rp 6,232,000.00	100%
			b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 80,156,500.00	Rp 75,169,150.00	93.78
			c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 14,008,000.00	Rp 13,152,166.00	93.89
			d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 12,441,000.00	Rp 12,145,142.00	97.62
			e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 5,280,000.00	Rp 5,280,000.00	100
			f. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 7,000,000.00	Rp 7,000,000.00	100
			g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 83,568,000.00	Rp 57,486,488.00	68.79
	Pengadaan Barang	a. Pengadaan Mebel	Rp 37,875,000.00	Rp 35,500,000.00	93.73	



	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 296,407,500.00	Rp 175,537,101.00	59.22
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 253,308,858.00	Rp 238,142,009.00	94.01
		b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 145,400,000.00	Rp 107,460,425.00	73.91
		c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 833,234,564.00	Rp 803,136,122.00	96.39
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 242,380,000.00	Rp 191,188,596.00	78.88
		b. Pemeliharaan Mebel	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	100
		c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 116,490,000.00	Rp 114,406,255.00	98.21
		d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 150,000,000.00	Rp 146,502,835.00	97.67
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 787,388,000.00	Rp 775,883,775.00	98.54
		b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 1,970,335,000.00	Rp 1,836,904,285.00	93.23
		c. Pembentukan Paskibraka	Rp 2,665,523,200.00	Rp 2,561,633,986.00	96.10
Peningkatan Peran Serta Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp 7,850,000.00	Rp 6,910,000.00	88.03



	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<p>b. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p>	Rp 1,743,436,000.00	Rp 1,735,721,680.00	99.56
		<p>c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p>	Rp 181,057,000.00	Rp 147,560,200.00	81.50
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<p>a. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p>	Rp 888,427,500.00	Rp 444,306,900.00	50.01
Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<p>a. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	Rp 2,446,909,268.00	Rp 2,283,205,468.00	93.31



Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 229,243,000.00	Rp 208,178,008.00	90.81
		b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 327,006,000.00	Rp 323,448,000.00	98.91
		c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Rp 296,270,000.00	Rp 249,910,000.00	84.35
		d. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 278,671,000.00	Rp 167,650,000.00	60.16
TOTAL			Rp 21,012,131,040.00	Rp 19,244,851,461.00	91.59

Berdasarkan Tabel 3.30 Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025, total anggaran sebesar Rp21.012.131.040,00 dengan realisasi sebesar Rp19.244.851.461,00 atau 91,59%. Capaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran yang baik dan



mencerminkan konsistensi antara perencanaan dan implementasi program/kegiatan. Sisa anggaran sebesar 8,41% pada prinsipnya menggambarkan adanya efisiensi dan penyesuaian kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagian besar sub kegiatan terealisasi di atas 90%, terutama pada komponen administrasi umum, jasa penunjang, dan pemeliharaan aset daerah. Hal ini menunjukkan fungsi manajerial dan operasional perangkat daerah berjalan stabil. Namun terdapat beberapa sub kegiatan dengan realisasi relatif rendah, seperti pengadaan peralatan dan mesin lainnya (59,22%) serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (68,79%). Kondisi ini lebih mencerminkan efisiensi belanja dan penyesuaian kebutuhan aktual dibandingkan hambatan pelaksanaan.

Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, realisasi anggaran berada pada rentang 93%–98%, termasuk kegiatan pembentukan Paskibraka dan koordinasi wawasan kebangsaan. Tingginya serapan anggaran mengindikasikan bahwa program prioritas pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan dilaksanakan secara optimal dan konsisten.

Program Peningkatan Peran Serta Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik juga menunjukkan kinerja yang sangat baik, khususnya pada kegiatan koordinasi yang mencapai 99,56%. Meskipun demikian, pada komponen monitoring dan evaluasi realisasinya 81,50%, yang menunjukkan masih terdapat ruang penyempurnaan dalam aspek evaluatif dan pelaporan.

Pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, realisasi anggaran tercatat sebesar 50,01%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 49,99%. Rendahnya tingkat serapan tersebut terutama disebabkan oleh beberapa belanja hibah kepada masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang tidak dapat direalisasikan tepat waktu. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterlambatan pemenuhan persyaratan administrasi, kelengkapan dokumen pendukung, serta proses verifikasi dan evaluasi kelayakan penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, deviasi anggaran lebih mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam penyaluran hibah daripada tidak terlaksananya fungsi pembinaan dan pengawasan ormas secara substantif.



Pada Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, realisasi mencapai 93,31%, menunjukkan stabilitas pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerukunan umat beragama, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta pembinaan ketahanan sosial budaya daerah.

Sementara itu, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial menunjukkan kinerja anggaran yang relatif baik, dengan sebagian besar sub kegiatan terealisasi di atas 90%, khususnya pada pelaksanaan kebijakan (90,81%) dan koordinasi kewaspadaan dini (98,91%). Hal ini mencerminkan optimalnya sinergi lintas instansi dalam menjaga stabilitas daerah. Adapun pada kegiatan monitoring dan evaluasi realisasinya 84,35%, serta pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebesar 60,16%. Variasi ini dipengaruhi oleh dinamika situasi keamanan dan ketertiban daerah yang bersifat kondisional, sehingga kebutuhan anggaran menyesuaikan dengan intensitas pertemuan dan urgensi penanganan isu strategis di lapangan.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar 91,59% menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan. Variasi tingkat serapan pada beberapa program lebih disebabkan oleh faktor efisiensi, penyesuaian kebutuhan riil, serta kehati-hatian dalam tata kelola hibah dan kegiatan koordinatif, bukan karena kegagalan pencapaian tujuan program. Ke depan, diperlukan penguatan akurasi perencanaan dan penjadwalan kegiatan agar deviasi serapan anggaran dapat diminimalkan tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan program



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* terkait atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar pada Tahun 2025 dan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2021 – 2026. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar telah berhasil dalam melakukan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dalam capaian kinerja kegiatan dan sarannya.

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan dari seluruh perangkat kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar yang telah mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian keberhasilan yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tidak terlepas dari hambatan–hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan–hambatan dalam pencapaian kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis kinerja sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar selama Tahun 2025 pada umumnya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal tersebut tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang secara keseluruhan telah memenuhi bahkan melampaui target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian kinerja ini menunjukkan adanya keterkaitan yang selaras antara perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengukuran dan pelaporan kinerja, sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Meskipun demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar menyadari bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas organisasi. Oleh karena itu, pada periode



selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), antara lain melalui penguatan kualitas perencanaan kinerja yang berorientasi hasil (outcome), penyempurnaan indikator kinerja agar lebih spesifik, terukur, dan relevan, serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi akan terus diupayakan guna mendukung pencapaian kinerja yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Dengan dilaksanakannya berbagai upaya perbaikan tersebut, diharapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar pada tahun-tahun mendatang dapat semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan terwujudnya stabilitas keamanan, ketertiban, serta kehidupan sosial politik masyarakat Kota Denpasar yang kondusif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 02 Februari 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Denpasar,



A.A. Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19720313 199603 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, S.E.
Jabatan : Walikota Denpasar
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 3 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Denpasar

Pihak Kedua,
Walikota Denpasar



I Gusti Ngurah Jaya Negara



A.A. Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, SE.
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19720313 199603 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penurunan kasus konflik sosial di Kota Denpasar	Persentase penurunan kasus konflik sosial	7%

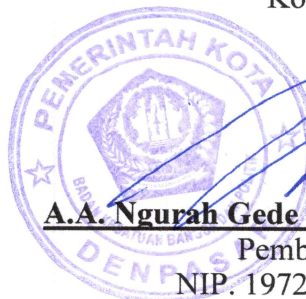
Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.122.587.982	APBD
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 5.983.244.200	APBD
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 1.759.246.000	APBD
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 525.579.500	APBD
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 1.925.086.000	APBD
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.418.352.000	APBD
Jumlah Anggaran	Rp. 20.734.095.682	

Walikota Denpasar,



I Gusti Ngurah Jaya Negara, S.E.

Denpasar, 3 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,



A.A. Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.

Pembina Tk. I / IVb

NIP. 19720313 199603 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR
PERIODE 2021 - 2026**


Tugas Pokok :

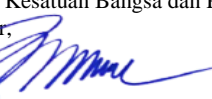
Badan Kesbangpol Kota Denpasar mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang kesatuan bangsa dan politik.

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	METODOLOGI	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban	- Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(Realisasi pelaksanaan kegiatan dibagi Target kegiatan) X 100%	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
	- Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik	(Realisasi partisipasi parpol dan lembaga pendidikan politik dibagi Target parpol dan lembaga pendidikan politik) X 100%	Bidang Politik Dalam Negeri	Bidang Politik Dalam Negeri	
	- Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	(Data Ormas tahun sebelumnya ditambah data Ormas tahun berjalan dibagi Jumlah Ormas yang terdaftar) X 100%	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	
	- Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	(Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pemantauan dibagi Target laporan pembinaan dan pemantauan) X 100%	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	
Optimalnya upaya penanganan kriminalitas	- Persentase penurunan konflik sosial	(Jumlah laporan kasus konflik sosial dibagi Target laporan kasus konflik sosial) X 100%	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,

A.A. Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.
 Pembina Tk.I
 NIP. 19720313 199603 1 002